



RENJA

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

2026



D39372A350

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/wd39372A350>

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat telah menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Tahun 2026.

Rencana Kerja (Renja) BKD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang memberikan gambaran tentang program dan kegiatan prioritas pada Tahun Anggaran 2026. Penyusunan Renja BKD Provinsi Jawa Barat dilakukan dengan melihat hasil pencapaian kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, fenomena yang ada, serta isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan. Tujuan penyusunan Rencana Kerja BKD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 ini adalah untuk dapat menjadi pedoman peningkatan kinerja, evaluasi dasar kinerja, profesionalisme pengembangan sumber daya aparatur, serta efisiensi dan efektifitas penganggaran Tahun 2026.

Demikian, semoga Rencana Kerja (RENJA) BKD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 ini dapat bermanfaat untuk menjadi rujukan serta pedoman bagi jajaran BKD Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan tugas.

Bandung, 28 Juli 2025

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

 Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT,

Dr. H. DEDI SUPANDI., S.STP., M.Si.
Pembina Utama Madya



D39372A350

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/D39372A350>

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA BKD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja BKD Provinsi Jawa Barat TW II Tahun 2025 dan Capaian Renstra BKD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026	6
2.2 Analisis Kinerja Layanan BKD Provinsi Jawa Barat	39
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKD Provinsi Jawa Barat	39
2.4 Review Terhadap RKPD Tahun 2026	46
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	
BAB III TUJUAN DAN SASARAN BKD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2026	51
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	51
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja BKD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026	62
3.3 Program dan Kegiatan	63
3.4 Sinkronisasi Program dan Kegiatan di Lingkungan BKD Provinsi Jawa Barat	
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2026	70
BAB V PENUTUP	121
Lampiran-Lampiran	



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan adalah langkah awal dalam menjalankan suatu organisasi, dimana perencanaan berfungsi membantu para pengambil kebijakan dalam menetapkan tujuan yang ingin dicapai terutama untuk menyusun strategi dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Peran strategis perencanaan ini diperkuat dengan terbitnya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang mengamanatkan setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Dalam meminimalisir pemborosan dan tumpang tindih pelaksanaan kegiatan maka perencanaan dilakukan dalam rangka menetapkan standar yang akan dipakai untuk mempermudah melakukan monitoring dan evaluasi.

Sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perangkat Daerah menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Rencana Kerja BKD sendiri merupakan dokumen perencanaan pembangunan BKD untuk periode 1 (satu) tahun yang menggambarkan program dan kegiatan, serta memuat diantaranya tujuan, sasaran serta target capaian kinerja yang akan dilaksanakan dan dicapai pada dalam 1 tahun. Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dilakukan dengan melihat hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, fenomena yang ada, serta isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan. Oleh karena itu diperlukan kemampuan organisasi dalam membaca berbagai permasalahan yang mungkin

dihadapi selama pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan karena hal tersebut akan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/D39372A350>



menjadi pertimbangan dalam menentukan program dan kegiatan di tahun selanjutnya.

Rencana Kerja BKD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 telah diselaraskan dengan dokumen Renstra BKD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 dan dokumen RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 akan dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun program dan kegiatan BKD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 yang telah ditetapkan dalam program prioritas pembangunan daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran pembangunan.

Gambar 1.1

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah



Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017 dan Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2026 adalah:

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);



D39372A350

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/D39372A350>

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029;
9. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/D39372A350>

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 236);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembar Daerah Nomor 237);
16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 78 Seri E);
17. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 140 Tahun 2022 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat;
18. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
19. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2026;
20. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nomor Kep.726/PR.03/Sekre/2025 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen Renja BKD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 dimaksudkan untuk meningkatkan kesinambungan dan korelasi antara dokumen perencanaan BKD Provinsi Jawa Barat dengan dokumen perencanaan Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta menjadikan dokumen Rencana Kerja sebagai *Base Sector* atau panduan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja BKD Provinsi Jawa Barat tahun 2026, adalah :

1. Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah diharapkan dapat menjadi pedoman peningkatan kinerja, evaluasi dasar kinerja, profesionalisme pengembangan sumber daya aparatur, dan efisiensi dan efektifitas penganggaran tahun 2026; dan

Memusnahkan Program dan Kegiatan BKD Provinsi Jawa Barat tahun 2026
 Merupakan Program dan Kegiatan yang telah diresmikan secara digital oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/D39372A350>



1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja BKD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 terdiri dari 5 (lima) Bab yang dijelaskan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Renja BKD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026.

1.2. Landasan Hukum

Menjelaskan Dasar Hukum yang digunakan dalam menyusun Renja BKD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan Renja BKD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja BKD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026.

BAB II : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA BKD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja BKD Provinsi Jawa Barat Triwulan II Tahun 2025 dan Capaian Renstra BKD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026.

2.2 Analisis Kinerja Layanan BKD Provinsi Jawa Barat.

Menjelaskan analisis kinerja pelayanan organisasi BKD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKD Provinsi Jawa Barat

Menjelaskan isu-isu penting terkait Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKD Provinsi Jawa Barat.

2.4 Review terhadap RKPD Tahun 2026

Menjelaskan Review terhadap RKPD Tahun 2026 ke dalam Renja BKD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Menjelaskan hasil penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2025 ke dalam Renja BKD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026.



BAB III : TUJUAN DAN SASARAN BKD PROV JABAR TAHUN 2026**3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.**

Menjelaskan telaahan terhadap kebijakan nasional kedalam Renja BKD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja BKD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026.**3.3 Program dan Kegiatan.****3.4 Sinkronisasi Program dan Kegiatan di Lingkungan BKD Provinsi Jawa Barat.****BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2026**

Menguraikan Rencana Kerja dan Pendanaan yang akan dilaksanakan BKD Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2026.

BAB V : PENUTUP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/D39372A350>

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA BKD TAHUN 2024

Rencana Kerja merupakan salah satu faktor utama dalam meningkatkan perencanaan kinerja agar lebih terarah dalam mendukung pelaksanaan kinerja instansi pemerintah, serta monitoring dan evaluasi program/kegiatan/sub kegiatan. Evaluasi terhadap Rencana Kerja BKD Tahun 2024 dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Hambatan dan capaian Kinerja yang sudah diraih oleh Badan Kepegawaian Daerah;
2. Telaahan atau analisa serta solusi dari faktor-faktor penyebab tidak tercapainya kinerja.

Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 di selaraskan dengan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan dan Capaian Renstra BKD 2024 dan Rencana Kerja BKD TW II Tahun 2025.

2.1.1 Capaian Renstra BKD 2025-2029

Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 telah dilakukan oleh BKD Provinsi Jawa Barat secara optimal dan terukur dengan memperhatikan efektifitas dan efisiensi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah di tetapkan. Pada Tahun 2024, BKD Provinsi Jawa Barat mempunyai 2 (dua) program, 11 (sebelas) kegiatan, dan 39 (tiga puluh sembilan) sub kegiatan. Secara rinci rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2025-2029, disajikan dalam tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Renstra 2025-2029 berikut ini :



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Out put)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2024 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab	Keterang an
										I		II		III		IV											
				Kinerja	Rp.	Kiner ja	Rp.	Kiner ja	Rp.	Kiner ja	Rp.	Kiner ja	Rp.	Kiner ja	Rp.	Kiner ja	Rp.	Kiner ja	Rp.	Kiner ja	Rp.	Kiner ja	Rp.	Kiner ja	Rp.		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
1	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			Rp 83.161.090. 935		Rp 72.429.597. 869		Rp 83.161.090. 935		Rp 15.659.634. 495		Rp 18.770.596. 223		Rp 18.963.645. 505		Rp 26.951.302. 696		Rp 80.345.178. 919		96,6 1		Rp 1.527.747. 768		0 1,8 4		
	5.03	KEPEGAWAIAN			Rp 83.161.090. 935		Rp 72.429.597. 869		Rp 83.161.090. 935		Rp 15.659.634. 495		Rp 18.770.596. 223		Rp 18.963.645. 505		Rp 26.951.302. 696		Rp 80.345.178. 919		96,6 1		Rp 1.527.747. 768		0 1,8 4		
	5.03.0.00.0.00.01. 0000	Badan Kepegawaian Daerah			Rp 83.161.090. 935		Rp 72.429.597. 869		Rp 83.161.090. 935		Rp 15.659.634. 495		Rp 18.770.596. 223		Rp 18.963.645. 505		Rp 26.951.302. 696		Rp 80.345.178. 919		96,6 1		Rp 1.527.747. 768		0 1,8 4		
	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	KATEGORI	Rp 62.841.260. 689		Rp 54.025.928. 583	84	Rp 62.841.260. 689	0	Rp 13.838.528. 839	0	Rp 16.484.833. 791	0	Rp 16.015.296. 933	84,32	Rp 14.969.306. 613	84,32	Rp 61.307.966. 176	100,0 0	97,5 6		Rp 1.153.338. 948	0,00	0,0 2	Badan Kepegawa ian Daerah	
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	KATEGORI		A		A							A		A		100,0 0		A		0,00		0,0 2	Badan Kepegawa ian Daerah	
	5.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun	PERSEN	Rp 528.717.20 0		Rp 321.561.13 0	100	Rp 528.717.20 0	100	Rp 232.612.09 4	100	Rp 52.731.747	100	Rp 69.157.680	100	Rp 172.045.93 3	100	Rp 526.547.45 4	100,0 0	99,5 9		Rp 8.481.086	0,00	0,0 2	Badan Kepegawa ian Daerah	
	5.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DOKUMEN	Rp 400.503.00 0		Rp -	14	Rp 400.503.00 0	4	Rp 232.612.09 4	3	Rp 34.955.147	3	Rp 41.159.180	4	Rp 91.308.533	14	Rp 400.034.95 4	100,0 0	99,8 8		Rp 4.000.350	0,00	0,0 1	Badan Kepegawa ian Daerah	
	5.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	LAPORAN	Rp 128.214.20 0		Rp -	4	Rp 128.214.20 0	1	Rp -	1	Rp 17.776.600	1	Rp 27.998.500	1	Rp 80.737.400	4	Rp 126.512.50 0	100,0 0	98,6 7		Rp 1.265.125	0,00	0,0 1	Badan Kepegawa ian Daerah	
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan(%)																				100,0 0	99,2 8			0,00	0,0 1		
Predikat Kinerja																				ST	ST			SR	SR		
	5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	PERSEN	Rp 46.337.408. 875		Rp 41.848.905. 343	100	Rp 46.337.408. 875	100	Rp 11.623.979. 345	100	Rp 12.855.366. 317	100	Rp 10.370.642. 906	100	Rp 10.347.329. 898	100	Rp 45.197.318. 466	100,0 0	97,5 4		Rp 870.462.23 8	0,00	0,0 2	Badan Kepegawa ian Daerah	
	5.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	ORANG/ BULAN	Rp 46.120.878. 449		Rp -	140	Rp 46.120.878. 449	138	Rp 11.615.535. 245	137	Rp 12.797.799. 317	137	Rp 10.245.353. 406	137	Rp 10.322.574. 298	137	Rp 44.981.262. 266		97,5 3		Rp 449.812.62 3	0,00	0,0 1	Badan Kepegawa ian Daerah	
	5.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semeste ran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD	LAPORAN	Rp 216.530.42 6		Rp -	15	Rp 216.530.42 6	3	Rp 8.444.100	3	Rp 57.567.000	4	Rp 125.289.50 0	5	Rp 24.755.600	15	Rp 216.056.20 0	100,0 0	99,7 8		Rp 2.160.562	0,00	0,0 1	Badan Kepegawa ian Daerah	
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan(%)																				50,00	98,6 6			0,00	0,0 1		
Predikat Kinerja																				SR	ST			SR	SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Out put)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2024 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
										I		II		III		IV											
				Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
	5.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian dan Keterbukaan Informasi Publik Perangkat Daerah yang disediakan	PERSEN	Rp 60.000.000		Rp -	100	Rp 60.000.000	100	Rp -	100	Rp -	100	Rp 39.150.000	100	Rp 20.000.000	100	Rp 59.150.000	100,00	98,58		Rp 591.500	0,00	0,01	Badan Kepegawaian Daerah	
	5.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	ORANG	Rp 60.000.000		Rp -	25	Rp 60.000.000	0	Rp -	0	Rp -	6	Rp 39.150.000	19	Rp 20.000.000	25	Rp 59.150.000	100,00	98,58		Rp 591.500	0,00	0,01	Badan Kepegawaian Daerah	
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan(%)																				100,00	98,58			0,00	0,01		
Predikat Kinerja																				ST	ST			SR	SR		
	5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum perangkat daerah yang disediakan	PERSEN	Rp 2.424.650.528		Rp 2.066.802.369	100	Rp 2.424.650.528	100	Rp 261.061.014	100	Rp 365.884.493	100	Rp 491.733.318	100	Rp 1.223.945.821	100	Rp 2.342.624.646	100,00	96,62		Rp 44.094.270	0,00	0,02	Badan Kepegawaian Daerah	
	5.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	PAKET	Rp 548.937.025		Rp -	20	Rp 548.937.025	6	Rp 82.883.350	6	Rp 91.093.732	5	Rp 88.741.850	3	Rp 265.298.383	20	Rp 528.017.315	100,00	96,19		Rp 5.280.173	0,00	0,01	Badan Kepegawaian Daerah	
	5.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	PAKET	Rp 247.422.500		Rp -	12	Rp 247.422.500	3	Rp 46.945.000	3	Rp 49.130.500	3	Rp 58.824.000	3	Rp 91.749.000	12	Rp 246.648.500	100,00	99,69		Rp 2.466.485	0,00	0,01	Badan Kepegawaian Daerah	
	5.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	LAPORAN	Rp 163.320.000		Rp -	12	Rp 163.320.000	3	Rp 23.305.000	3	Rp 35.750.000	3	Rp 5.900.000	3	Rp 89.017.500	12	Rp 153.972.500	100,00	94,28		Rp 1.539.725	0,00	0,01	Badan Kepegawaian Daerah	
	5.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	LAPORAN	Rp 1.464.971.003		Rp -	12	Rp 1.464.971.003	3	Rp 107.927.664	3	Rp 189.910.261	3	Rp 338.267.468	3	Rp 777.880.938	12	Rp 1.413.986.331	100,00	96,52		Rp 14.139.863	0,00	0,01	Badan Kepegawaian Daerah	
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan(%)																				100,00	96,67			0,00	0,01		
Predikat Kinerja																				ST	ST			SR	SR		
	5.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	PERSEN	Rp 1.550.533.221		Rp 1.708.739.778	100	Rp 1.550.533.221	100	Rp 119.456.000	100	Rp 477.709.000	100	Rp 103.650.000	100	Rp 800.042.145	100	Rp 1.500.857.145	100,00	96,80		Rp 32.095.969	0,00	0,02	Badan Kepegawaian Daerah	
	5.03.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	UNIT	Rp 1.550.533.221		Rp -	1	Rp 1.550.533.221	0	Rp 119.456.000	0	Rp 477.709.000	0	Rp 103.650.000	1	Rp 800.042.145	1	Rp 1.500.857.145	100,00	96,80		Rp 15.008.571	0,00	0,01	Badan Kepegawaian Daerah	
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan(%)																				100,00	96,80			0,00	0,01		
Predikat Kinerja																				ST	ST			SR	SR		
	5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Unit Kerja Yang Terlayani Jasa Pelayanan Umum Kantor	PERSEN	Rp 4.957.727.737		Rp 3.676.571.201	100	Rp 4.957.727.737	100	Rp 884.604.886	100	Rp 1.129.936.858	100	Rp 1.121.868.209	100	Rp 1.571.667.616	100	Rp 4.708.077.569	100,00	94,96		Rp 83.846.488	0,00	0,02	Badan Kepegawaian Daerah	
	5.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	LAPORAN	Rp 639.649.218		Rp -	12	Rp 639.649.218	3	Rp 105.555.289	3	Rp 112.659.567	3	Rp 165.795.191	3	Rp 190.539.528	12	Rp 574.549.575	100,00	89,82		Rp 5.745.496	0,00	0,01	Badan Kepegawaian Daerah	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Out put)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2024 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penangu ng Jawab	Keterang an				
				Kinerja	Rp.	Kiner ja	Rp.	Kiner ja	Rp.	Kiner ja	Rp.	Kiner ja	Rp.	Kiner ja	Rp.	Kiner ja	Rp.	Kiner ja	Rp.	Kiner ja	Rp.						
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
	5.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	LAPORAN	Rp 129.440.000		Rp -	12	Rp 129.440.000	3	Rp -	3	Rp 30.653.500	3	Rp 21.995.000	3	Rp 56.519.000	12	Rp 109.167.500	100,00	84,34		Rp 1.091.675	0,00	0,01	Badan Kepegawaian Daerah	
	5.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	LAPORAN	Rp 4.188.638.519		Rp -	12	Rp 4.188.638.519	3	Rp 779.049.597	3	Rp 986.623.791	3	Rp 934.078.018	3	Rp 1.324.609.088	12	Rp 4.024.360.494	100,00	96,08		Rp 40.243.605	0,00	0,01	Badan Kepegawaian Daerah	
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan(%)																				100,00	90,08			0,00	0,01		
Predikat Kinerja																				ST	T			SR	SR		
	5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	PERSEN	Rp 6.982.223.128		Rp 4.403.348.762	100	Rp 6.982.223.128	100	Rp 716.815.500	100	Rp 1.603.205.376	100	Rp 3.819.094.820	100	Rp 834.275.200	100	Rp 6.973.390.896	100,00	99,87		Rp 113.767.397	0,00	0,02	Badan Kepegawaian Daerah	
	5.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	UNIT	Rp 900.061.000		Rp -	43	Rp 900.061.000	4	Rp 217.693.300	4	Rp 218.398.200	4	Rp 221.911.600	31	Rp 239.606.200	43	Rp 897.609.300	100,00	99,73		Rp 8.976.093	0,00	0,01	Badan Kepegawaian Daerah	
	5.03.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	UNIT	Rp 6.082.162.128		Rp -	12	Rp 6.082.162.128	3	Rp 499.122.200	3	Rp 1.384.807.176	3	Rp 3.597.183.220	3	Rp 594.669.000	12	Rp 6.075.781.596	100,00	99,90		Rp 60.757.816	0,00	0,01	Badan Kepegawaian Daerah	
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan(%)																				100,00	99,81			0,00	0,01		
Predikat Kinerja																				ST	ST			SR	SR		
Rata-Rata Capaian Kinerja Program(%)																				92,86	97,71			0,00	0,02		
Predikat Kinerja																				ST	ST			SR	SR		
	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Nilai Kriteria Perencanaan Kebutuhan; Pengadaan; Perlindungan Dan Pelayanan; Dan Sistem Informasi Kepegawaian	POIN	Rp 20.319.830.246	116,5	Rp 18.403.669.286	117,5	Rp 20.319.830.246	0	Rp 1.821.105.656	115	Rp 2.285.762.432	0	Rp 2.948.348.572	0	Rp 11.981.996.083	115	Rp 19.037.212.743	97,87	93,69	231,5	Rp 374.408.820	0,00	0,02	Badan Kepegawaian Daerah	
			Nilai Kriteria Promosi dan Mutasi	POIN		40		40		0		40		0		0		40	100,00		80		0,00		Badan Kepegawaian Daerah		
			Nilai Kriteria Manajemen Kinerja dan Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	POIN		120		120		0		120		0		0		120	100,00		240		0,00		Badan Kepegawaian Daerah		
			Nilai Profesionalitas ASN Dimensi Kinerja	POIN				27,5		0		0		27,76		0		27,76	100,00				0,00		Badan Kepegawaian Daerah		
			Nilai Profesionalitas ASN Dimensi Kualifikasi	POIN				12,5		0		0		21,04		0		21,04	100,00				0,00		Badan Kepegawaian Daerah		
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut:																											

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Out put)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2024 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab	Keterang an
										I		II		III		IV											
				Kinerja	Rp.	Kiner ja	Rp.	Kiner ja	Rp.	Kiner ja	Rp.	Kiner ja	Rp.	Kiner ja	Rp.	Kiner ja	Rp.	Kiner ja	Rp.	Kiner ja	Rp.	Kiner ja	Rp.	Kiner ja	Rp.		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
			Nilai Profesionalitas ASN Dimensi Disiplin	POIN				4,9		0		0		5		0		5		100,0 0				0,00		Badan Kepegawa ian Daerah	
			Nilai Kriteria Pengembangan Karier	POIN		120		120		0		125		0		0		125		100,0 0		245		0,00		Badan Kepegawa ian Daerah	
	5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Nilai Kriteria Perencanaan Kebutuhan; Pengadaan; Perlindungan Dan Pelayanan; Dan Sistem Informasi Kepegawaian	POIN	Rp 12.233.957. 470	Rp 10.170.818. 406		117,5	Rp 12.233.957. 470	0	Rp 1.144.547.1 70	115	Rp 1.243.642.9 00	0	Rp 1.361.633.5 00	0	Rp 7.465.274.1 40	115	Rp 11.215.097. 710	97,87	91,6 7		Rp 213.859.16 1	0,00	0,0 2	Badan Kepegawa ian Daerah	
	5.03.02.1.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	DOKUM EN	Rp 7.757.416.5 01	Rp -	1	Rp 7.757.416.5 01	0	Rp 518.571.50 0	0	Rp 164.531.35 0	0	Rp 297.131.30 0	1	Rp 5.780.822.5 00	1	Rp 6.761.056.6 50	100,0 0	87,1 6		Rp 67.610.567	0,00	0,0 1	Badan Kepegawa ian Daerah		
	5.03.02.1.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	DOKUM EN	Rp 171.910.70 0	Rp -	4	Rp 171.910.70 0	1	Rp 15.647.000	1	Rp 49.860.500	1	Rp 66.093.700	1	Rp 39.874.500	4	Rp 171.475.70 0	100,0 0	99,7 5		Rp 1.714.757	0,00	0,0 1	Badan Kepegawa ian Daerah		
	5.03.02.1.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	LEMBA GA	Rp 859.594.80 4	Rp -	3	Rp 859.594.80 4	0	Rp 48.285.670	3	Rp 97.325.900	0	Rp 204.553.00 0	0	Rp 502.407.04 0	3	Rp 852.571.61 0	100,0 0	99,1 8		Rp 8.525.716	0,00	0,0 1	Badan Kepegawa ian Daerah		
	5.03.02.1.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	DOKUM EN	Rp 3.394.198.7 15	Rp -	1	Rp 3.394.198.7 15	0	Rp 544.415.00 0	0	Rp 910.725.15 0	0	Rp 793.855.50 0	1	Rp 1.130.330.1 00	1	Rp 3.379.325.7 50	100,0 0	99,5 6		Rp 33.793.258	0,00	0,0 1	Badan Kepegawa ian Daerah		
	5.03.02.1.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	DOKUM EN	Rp 50.836.750	Rp -	1	Rp 50.836.750	0	Rp 17.628.000	0	Rp 21.200.000	0	Rp -	1	Rp 11.840.000	1	Rp 50.668.000	100,0 0	99,6 7		Rp 506.680	0,00	0,0 1	Badan Kepegawa ian Daerah		
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan(%)																				100,0 0	97,0 6			0,00	0,0 1		
Predikat Kinerja																				ST	ST			SR	SR		
	5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN	Nilai Kriteria Promosi dan Mutasi	POIN	Rp 1.430.321.5 81	Rp 2.120.335.6 39	40	Rp 1.430.321.5 81	0	Rp 369.655.50 0	0	Rp 192.415.00 0	40	Rp 282.577.00 0	0	Rp 573.409.40 0	40	Rp 1.418.056.9 00	100,0 0	99,1 4		Rp 35.383.925	0,00	0,0 2	Badan Kepegawa ian Daerah		
	5.03.02.1.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	DOKUM EN	Rp 452.987.19 7	Rp -	1	Rp 452.987.19 7	0	Rp 85.781.000	0	Rp 120.361.50 0	0	Rp 47.696.000	1	Rp 197.501.50 0	1	Rp 451.340.00 0	100,0 0	99,6 4		Rp 4.513.400	0,00	0,0 1	Badan Kepegawa ian Daerah		
	5.03.02.1.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	LAPORA N	Rp 454.600.48 4	Rp -	8	Rp 454.600.48 4	1	Rp 196.687.00 0	3	Rp 22.207.000	1	Rp 122.684.50 0	3	Rp 105.027.50 0	8	Rp 446.606.00 0	100,0 0	98,2 4		Rp 4.466.060	0,00	0,0 1	Badan Kepegawa ian Daerah		
	5.03.02.1.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	DOKUM EN	Rp 522.733.90 0	Rp -	6	Rp 522.733.90 0	0	Rp 87.187.500	3	Rp 49.846.500	0	Rp 112.196.50 0	3	Rp 270.880.40 0	6	Rp 520.110.90 0	100,0 0	99,5 0		Rp 5.201.109	0,00	0,0 1	Badan Kepegawa ian Daerah		
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan(%)																				100,0 0	99,1 3			0,00	0,0 1		
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital																				SR	SR						



D39372A350

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/D39372A350>

No	Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Out put)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2024 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab	Keterang an
										I		II		III		IV											
				Kinerja	Rp.	Kiner ja	Rp.	Kiner ja	Rp.	Kiner ja	Rp.	Kiner ja	Rp.	Kiner ja	Rp.	Kiner ja	Rp.	Kiner ja	Rp.	Kiner ja	Rp.	Kiner ja	Rp.	Kiner ja	Rp.		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
	5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Nilai Kriteria Pengembangan Karier	POIN	Rp 4.420.402.359	Rp 3.910.384.521	120	Rp 4.420.402.359	0	Rp 142.403.586	125	Rp 554.272.232	0	Rp 564.837.500	0	Rp 2.909.159.901	125	Rp 4.170.673.219	100,00	94,35		Rp 80.810.577	0,00	0,02	Badan Kepegawa ian Daerah		
	5.03.02.1.03.0002	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	DOKUM EN	Rp 685.194.400	Rp -	11	Rp 685.194.400	2	Rp 12.504.000	3	Rp 30.422.125	3	Rp 61.101.500	3	Rp 563.688.246	11	Rp 667.715.871	100,00	97,45		Rp 6.677.159	0,00	0,01	Badan Kepegawa ian Daerah		
	5.03.02.1.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	DOKUM EN	Rp 1.989.756.000	Rp -	4	Rp 1.989.756.000	0	Rp 18.860.000	1	Rp 311.980.357	2	Rp 46.351.500	1	Rp 1.524.257.430	4	Rp 1.901.449.287	100,00	95,56		Rp 19.014.493	0,00	0,01	Badan Kepegawa ian Daerah		
	5.03.02.1.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	DOKUM EN	Rp 86.062.000	Rp -	4	Rp 86.062.000	0	Rp -	1	Rp 3.970.000	0	Rp 3.861.000	3	Rp 65.060.500	4	Rp 72.891.500	100,00	84,70		Rp 728.915	0,00	0,01	Badan Kepegawa ian Daerah		
	5.03.02.1.03.0006	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Sertifikasi Jabatan ASN	ORANG	Rp 178.890.000	Rp -	100	Rp 178.890.000	0	Rp -	0	Rp 2.617.500	80	Rp 134.396.500	20	Rp 39.727.304	100	Rp 176.741.304	100,00	98,80		Rp 1.767.413	0,00	0,01	Badan Kepegawa ian Daerah		
	5.03.02.1.03.0009	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	DOKUM EN	Rp 462.104.070	Rp -	6	Rp 462.104.070	2	Rp 70.750.000	1	Rp 77.178.000	2	Rp 15.763.000	1	Rp 193.743.114	6	Rp 357.434.114	100,00	77,35		Rp 3.574.341	0,00	0,01	Badan Kepegawa ian Daerah		
	5.03.02.1.03.0010	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	ORANG	Rp 277.363.391	Rp -	50	Rp 277.363.391	0	Rp 7.811.000	0	Rp 2.617.500	34	Rp 150.458.000	16	Rp 103.095.000	50	Rp 263.981.500	100,00	95,18		Rp 2.639.815	0,00	0,01	Badan Kepegawa ian Daerah		
	5.03.02.1.03.0012	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	LAPORA N	Rp 50.469.727	Rp -	2	Rp 50.469.727	0	Rp 582.750	1	Rp 10.971.000	0	Rp 12.006.500	1	Rp 26.372.625	2	Rp 49.932.875	100,00	98,94		Rp 499.329	0,00	0,01	Badan Kepegawa ian Daerah		
	5.03.02.1.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Fungsional ASN yang Dibina	ORANG	Rp 87.876.557	Rp -	20000	Rp 87.876.557	5243	Rp -	5000	Rp 3.645.000	5000	Rp -	5000	Rp 83.755.911	20243	Rp 87.400.911	100,00	99,46		Rp 874.009	0,00	0,01	Badan Kepegawa ian Daerah		
	5.03.02.1.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	DOKUM EN	Rp 575.691.382	Rp -	8	Rp 575.691.382	3	Rp 31.895.836	3	Rp 110.870.750	1	Rp 137.259.500	1	Rp 287.383.996	8	Rp 567.410.082	100,00	98,56		Rp 5.674.101	0,00	0,01	Badan Kepegawa ian Daerah		
	5.03.02.1.03.0015	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	LAPORA N	Rp 26.994.832	Rp -	2	Rp 26.994.832	0	Rp -	1	Rp -	0	Rp 3.640.000	1	Rp 22.075.775	2	Rp 25.715.775	100,00	95,26		Rp 257.158	0,00	0,01	Badan Kepegawa ian Daerah		
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan(%)																		100,00	94,12			0,00	0,01				
Predikat Kinerja																		ST	ST			SR	SR				
	5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Nilai Kriteria Manajemen Kinerja dan Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	POIN	Rp 2.235.148.836	Rp 2.202.130.720	120	Rp 2.235.148.836	0	Rp 164.499.400	120	Rp 295.432.300	0	Rp 739.300.572	0	Rp 1.034.152.642	120	Rp 2.233.384.914	100,00	99,92		Rp 44.355.156	0,00	0,02	Badan Kepegawa ian Daerah		
	5.03.02.1.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	DOKUM EN	Rp 699.236.500	Rp -	12	Rp 699.236.500	3	Rp 37.026.000	3	Rp 86.314.500	3	Rp 406.788.567	3	Rp 168.169.981	12	Rp 698.299.048	100,00	99,87		Rp 6.982.990	0,00	0,01	Badan Kepegawa ian Daerah		
	5.03.02.1.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	ORANG	Rp 1.149.684.000	Rp -	9	Rp 1.149.684.000	0	Rp 89.786.100	0	Rp 113.459.700	0	Rp 183.925.080	9	Rp 762.019.900	9	Rp 1.149.190.700	100,00	99,96		Rp 11.491.908	0,00	0,01	Badan Kepegawa ian Daerah		
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut.																											

No	Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Out put)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2024 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
										I		II		III		IV											
				Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
	5.03.02.1.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	ORANG	Rp 79.908.386		Rp -	5000	Rp 79.908.386	0	Rp 3.611.800	0	Rp 17.366.000	0	Rp 42.151.700	5000	Rp 16.774.686	5000	Rp 79.904.186	100,00	99,99		Rp 799.042	0,00	0,01	Badan Kepegawaian Daerah	
	5.03.02.1.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	ORANG	Rp 278.576.459		Rp -	45977	Rp 278.576.459	921	Rp 28.107.000	126	Rp 71.224.100	125	Rp 99.071.725	45600	Rp 79.860.975	46772	Rp 278.263.800	100,00	99,89		Rp 2.782.638	0,00	0,01	Badan Kepegawaian Daerah	
	5.03.02.1.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	DOKUMEN	Rp 27.743.412		Rp -	11	Rp 27.743.412	3	Rp 5.968.500	3	Rp 7.068.000	3	Rp 7.363.500	2	Rp 7.327.100	11	Rp 27.727.100	100,00	99,94		Rp 277.271	0,00	0,01	Badan Kepegawaian Daerah	
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan(%)																				100,00	99,93			0,00	0,01		
Predikat Kinerja																				ST	ST			SR	SR		
Rata-Rata Capaian Kinerja Program(%)																				100,00	96,27			0,00	0,02		
Predikat Kinerja																				ST	ST			SR	SR		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																				96,43	96,99			0,00	0,02		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																				ST	ST			SR	SR		



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/D39372A350>

Berdasarkan tabel diatas jika dilihat dari penyerapan anggaran tahun 2024 telah mencapai 96,61 % dari pagu anggaran perubahan sebesar Rp.83.161.090.935 dengan Realisasi Rp.80.345.178.919,- sisa Anggaran Rp.2.815.912.016,- Adapun rata-rata capaian kinerja seluruh program adalah 100 % dan rata-rata capaian anggaran dari seluruh program adalah sebesar 96,99% sehingga predikat kinerja yang dicapai untuk Tahun 2024 adalah “Sangat Tinggi”.

Berdasarkan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 terdapat beberapa hambatan dan isu dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan, yaitu sebagai berikut :

1. Kegiatan BKD adalah kegiatan yang merupakan lanjutan dari program/kegiatan tahun sebelumnya, sehingga kendala yang akan dihadapi tidak akan terlalu berarti.
2. Terdapat kebijakan efisiensi anggaran yang menghambat dalam proses pertanggungjawaban keuangan.
3. Penetapan indikator kinerja sub kegiatan yang kurang tepat sehingga kinerja menjadi sulit terukur secara jelas.
4. Adanya perubahan regulasi dan kebijakan pimpinan yang berpengaruh secara tidak langsung terhadap pelaksanaan kegiatan.

2.1.2 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja BKD Provinsi Jawa Barat TW II Tahun 2025

Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Triwulan II Tahun 2025 telah dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat secara optimal dan terukur dengan memperhatikan efektifitas dan efisiensi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan. Pada Tahun 2025, BKD Provinsi Jawa Barat mempunyai 2 (dua) program, 11 (sebelas) kegiatan, dan 38 (tiga puluh delapan) sub kegiatan dengan alokasi anggaran menjadi Rp. 66.254.500.375,- sebagaimana tertuang dalam Perubahan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.

Hasil evaluasi terhadap capaian pelaksanaan Program Kepegawaian dan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 telah mencapai realisasi anggaran 31.244.199.327,- dengan persentase 47.16 % dari pagu anggaran perubahan sebesar Rp.66.254.500.375,- dengan sisa Anggaran Rp. 35.010.301.048,- dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 34,66% dan rata-rata capaian anggaran sebesar 35,74% sehingga predikat kinerja yang dicapai untuk Triwulan II Tahun 2025 adalah “**Sangat Rendah**”.



Tabel 2.2
Matrik Evaluasi Terhadap Rencana Kerja BKD Triwulan II Tahun 2025

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2025 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2025(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan														
										I				II				III				IV																											
				1	2	3	4	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	16	17																
1	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEPEGAWAIAN				Rp 66.254.500.375	Rp -		Rp 66.254.500.375		Rp 16.139.453.522		Rp 15.104.745.805		Rp -		Rp -		Rp 31.244.199.327		47,16		Rp 312.441.993	0	0,47																								
	5.03					Rp 66.254.500.375	Rp -		Rp 66.254.500.375		Rp 16.139.453.522		Rp 15.104.745.805		Rp -		Rp -		Rp 31.244.199.327		47,16		Rp 312.441.993	0	0,47																								
	5.03.0.00.0.0.01.0000	Badan Kepegawaian Daerah				Rp 66.254.500.375	Rp -		Rp 66.254.500.375		Rp 16.139.453.522		Rp 15.104.745.805		Rp -		Rp -		Rp 31.244.199.327		47,16		Rp 312.441.993	0	0,47																								
	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai RB General Perangkat Daerah	KATEGORI		Rp 56.492.536.584	Rp -	A	Rp 56.492.536.584		Rp 14.465.548.508	A	Rp 13.845.024.561		Rp -		Rp -	A	Rp 28.310.573.069	100,00	50,11		Rp 283.105.731	0,00	0,01	Badan Kepegawaian Daerah																							
	5.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	LAPORAN		Rp 170.338.475	Rp -	4	Rp 170.338.475	0	Rp 33.920.500		Rp 10.364.917		Rp -		Rp -	1	Rp 44.285.417	25,00	26,00		Rp 442.854	0,00	0,00	Badan Kepegawaian Daerah																							
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DOKUMEN				10		3		3						6		60,00			0,00			Badan Kepegawaian Daerah																							
	5.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DOKUMEN		Rp 125.837.000	Rp -	10	Rp 125.837.000	3	Rp 33.920.500	3	Rp 5.096.917		Rp -		Rp -	6	Rp 39.017.417	60,00	31,01		Rp 390.174	0,00	0,00	Badan Kepegawaian Daerah																							
	5.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	LAPORAN		Rp 44.501.475	Rp -	4	Rp 44.501.475	1	Rp -	1	Rp 5.268.000		Rp -		Rp -	2	Rp 5.268.000	50,00	11,84		Rp 52.680	0,00	0,00	Badan Kepegawaian Daerah																							
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan(%)																								55,00	21,42			0,00	0,00																				
Predikat Kinerja																								R	SR			SR	SR																				
	5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	LAPORAN		Rp 47.416.908.475	Rp -	15	Rp 47.416.908.475	3	Rp 12.220.307.151		Rp 11.855.152.111		Rp -		Rp -	6	Rp 24.075.459.262	40,00	50,77		Rp 240.754.593	0,00	0,01	Badan Kepegawaian Daerah																							
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	ORANG/				140		140		140						140		100,00			0,00			Badan Kepegawaian Daerah																							
	5.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	ORANG/ BULAN		Rp 47.283.848.475	Rp -	140	Rp 47.283.848.475	140	Rp 12.207.095.901	140	Rp 11.823.430.694		Rp -		Rp -	140	Rp 24.030.526.595	100,00	50,82		Rp 240.305.266	0,00	0,01	Badan Kepegawaian Daerah																							
	5.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	LAPORAN		Rp 133.060.000	Rp -	15	Rp 133.060.000	3	Rp 13.211.250		Rp 31.721.417		Rp -		Rp -	6	Rp 44.932.667	40,00	33,77		Rp 449.327	0,00	0,00	Badan Kepegawaian Daerah																							
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan(%)																								70,00	42,30			0,00	0,00																				
Predikat Kinerja																								S	SR			SR	SR																				
	5.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	ORANG		Rp 24.050.000	Rp -	25	Rp 24.050.000	0	Rp -	0	Rp -		Rp -		Rp -	0	Rp -	0,00	0,00		Rp -	0,00	0,00	Badan Kepegawaian Daerah																							
	5.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	ORANG		Rp 24.050.000	Rp -	25	Rp 24.050.000	0	Rp -	0	Rp -		Rp -		Rp -	0	Rp -	0,00	0,00		Rp -	0,00	0,00	Badan Kepegawaian Daerah																							
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan(%)																								0,00	0,00			0,00	0,00																				
Predikat Kinerja																								SR	SR			SR	SR																				
	5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	LAPORAN		Rp 1.412.475.415	Rp -	12	Rp 1.412.475.415	3	Rp 226.519.904	3	Rp 317.787.220		Rp -		Rp -	6	Rp 544.307.124	50,00	38,54		Rp 5.443.071	0,00	0,00	Badan Kepegawaian Daerah																							
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital																																																	



D39372A350

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/D39372A350>

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2025 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2025(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan							
									I		II		III		IV																	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.	K	Rp.			
1	2	3	4	5		6	7	8		9		10		11		12		13		14		15		16		17						
			Konsultasi SKPD																													
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	LAPORAN			12	3		3						6		50,00			0,00			Badan Kepegawaian Daerah								
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	PAKET			20	3		5						8		40,00			0,00			Badan Kepegawaian Daerah								
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	PAKET			12	3		3						6		50,00			0,00			Badan Kepegawaian Daerah								
	5.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	PAKET	Rp	334.543.021	Rp -	20	Rp	334.543.021	3	Rp	53.252.904		Rp	133.911.604	Rp -	Rp -	8	Rp	187.164.508	40,00	55,95		Rp	1.871.645	0,00	0,01		Badan Kepegawaian Daerah		
	5.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	PAKET	Rp	216.310.855	Rp -	12	Rp	216.310.855	3	Rp	70.233.000		Rp	41.009.125	Rp -	Rp -	6	Rp	111.242.125	50,00	51,43		Rp	1.112.421	0,00	0,01		Badan Kepegawaian Daerah		
	5.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	LAPORAN	Rp	245.000.000	Rp -	12	Rp	245.000.000	3	Rp	46.400.000		Rp	13.075.000	Rp -	Rp -	6	Rp	59.475.000	50,00	24,28		Rp	594.750	0,00	0,00		Badan Kepegawaian Daerah		
	5.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	LAPORAN	Rp	616.621.539	Rp -	12	Rp	616.621.539	3	Rp	56.634.000		Rp	129.791.491	Rp -	Rp -	6		Rp 186.425.491	50,00	30,23		Rp	1.864.255	0,00	0,00		Badan Kepegawaian Daerah		
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan(%)																		47,50	40,47			0,00	0,00									
Predikat Kinerja																		SR	SR			SR	SR									
	5.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	UNIT	Rp	662.189.553	Rp -	20	Rp	662.189.553	0	Rp	122.131.995		Rp	388.780.020		Rp -		Rp -	0	Rp	510.912.015	0,00	77,15		Rp	5.109.120	0,00	0,01		Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	UNIT	Rp	662.189.553	Rp -	20	Rp	662.189.553	0	Rp	122.131.995		Rp	388.780.020		Rp -		Rp -	0	Rp	510.912.015	0,00	77,15		Rp	5.109.120	0,00	0,01		Badan Kepegawaian Daerah
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan(%)																		0,00	77,15			0,00	0,01									
Predikat Kinerja																		SR	T			SR	SR									
	5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	LAPORAN	Rp	5.196.215.855	Rp -	12	Rp	5.196.215.855	3	Rp	1.170.542.899		Rp	1.101.062.994		Rp -		Rp -	6	Rp	2.271.605.893	50,00	43,72		Rp	22.716.059	0,00	0,00		Badan Kepegawaian Daerah
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	LAPORAN				12		3										6		50,00					0,00			Badan Kepegawaian Daerah		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	LAPORAN				12		3										6		50,00					0,00			Badan Kepegawaian Daerah		
	5.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	LAPORAN	Rp	506.396.816	Rp -	12	Rp	506.396.816	3	Rp	113.386.245		Rp	110.027.532		Rp -		Rp -	6	Rp	223.413.777	50,00	44,12		Rp	2.234.138	0,00	0,00		Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	LAPORAN	Rp	103.560.000	Rp -	12	Rp	103.560.000	3	Rp	8.375.000		Rp	34.003.800		Rp -		Rp -	6	Rp	42.378.800	50,00	40,92		Rp	423.788	0,00	0,00		Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	LAPORAN	Rp	4.586.259.039	Rp -	12	Rp	4.586.259.039	3	Rp	1.048.781.654		Rp	957.031.662		Rp -		Rp -	6	Rp	2.005.813.316	50,00	43,74		Rp	20.058.133	0,00	0,00		Badan Kepegawaian Daerah
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan(%)																		50,00	42,93			0,00	0,00									
Predikat Kinerja																		SR	SR			SR	SR									
	5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	UNIT	Rp	1.610.358.811	Rp -	43	Rp	1.610.358.811	12	Rp	692.126.059		Rp	171.877.299		Rp -		Rp -	22	Rp	864.003.358	51,16	53,65		Rp	8.640.034	0,00	0,01		Badan Kepegawaian Daerah



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital



D39372A350

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/D39372A350>

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2025 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2025(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan						
									I		II		III		IV																	
				1	2	3	4	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	16	17		
			yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya																													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	UNIT			12		3				3				6		50,00			0,00		Badan Kepegawaian Daerah								
	5.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	UNIT	Rp	668.580.000	Rp -	43	Rp	668.580.000	12	Rp	159.228.700		Rp	122.958.200		Rp -		Rp -	22	Rp	282.186.900	51,16	42,21		Rp	2.821.869	0,00	0,00	Badan Kepegawaian Daerah	
	5.03.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	UNIT	Rp	941.778.811	Rp -	12	Rp	941.778.811	3	Rp	532.897.359		Rp	48.919.099		Rp -		Rp -	6	Rp	581.816.458	50,00	61,78		Rp	5.818.165	0,00	0,01	Badan Kepegawaian Daerah	
																			Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan(%)		50,58	51,99			0,00	0,01						
																			Predikat Kinerja		SR	R			SR	SR						
																			Rata-Rata Capaian Kinerja Program(%)		39,01	41,40			0,00	0,00						
																			Predikat Kinerja		SR	SR			SR	SR						
5.03.02		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Nilai Kriteria Pengembangan Karier	POIN	Rp	9.761.963.791	Rp -	120	Rp	9.761.963.791		Rp	1.673.905.014		Rp	1.259.721.244		Rp -		Rp -		Rp	2.933.626.258		30,05		Rp	29.336.263	0,00	0,00	Badan Kepegawaian Daerah	
			Nilai Kriteria Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan, Perlindungan, Pelayanan, dan Sistem Informasi Kepegawaian	POIN				117,5																					0,00		Badan Kepegawaian Daerah	
			Nilai Kriteria Promosi dan Mutasi	POIN				40																					0,00		Badan Kepegawaian Daerah	
			Nilai Kriteria Manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	POIN				120																					0,00		Badan Kepegawaian Daerah	
			Nilai Profesionalitas ASN Dimensi Kinerja	POIN				28																					0,00		Badan Kepegawaian Daerah	
			Nilai Profesionalitas ASN Dimensi Kualifikasi	POIN				13																					0,00		Badan Kepegawaian Daerah	
			Nilai Profesionalitas ASN Dimensi Disiplin	POIN				4,99																					0,00		Badan Kepegawaian Daerah	
	5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	DOKUMEN	Rp	3.719.394.776	Rp -	1	Rp	3.719.394.776	0	Rp	1.021.271.666		Rp	610.247.944		Rp -		Rp -	0	Rp	1.631.519.610	0,00	43,87		Rp	16.315.196	0,00	0,00	Badan Kepegawaian Daerah	
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	DOKUMEN				4			1									2		50,00							0,00		Badan Kepegawaian Daerah	
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	LEMBAGA				3			1									2		66,67							0,00		Badan Kepegawaian Daerah	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	DOKUMEN				1			0									0		0,00							0,00		Badan Kepegawaian Daerah	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	DOKUMEN				1			0									0		0,00							0,00		Badan Kepegawaian Daerah	
		Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas	DOKUMEN	Rp	1.309.034.000	Rp	1	Rp	1.309.034.000	0	Rp	156.887.000		Rp	49.840.000		Rp		Rp	0	Rp	206.727.000	0,00	15,79		Rp	2.067.270	0,00	0,00	Badan Kepegawaian Daerah	
																			Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital													

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Serifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/D39372A350>

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2025 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2025(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan				
										I	II	III	IV																
				1	2	3	4	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	16	17
			Pengadaan PNS dan PPPK																										
	5.03.02.1.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	DOKUMEN	Rp	145.594.000	Rp -	4	Rp	145.594.000	1	Rp	45.151.000	1	Rp	19.087.500	Rp -	Rp -	2	Rp	64.238.500	50,00	44,12	Rp	642.385	0,00	0,00	Badan Kepegawaian Daerah	
	5.03.02.1.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	LEMBAGA	Rp	145.776.776	Rp -	3	Rp	145.776.776	1	Rp	51.169.000	1	Rp	39.755.000	Rp -	Rp -	2	Rp	90.924.000	66,67	62,37	Rp	909.240	0,00	0,01	Badan Kepegawaian Daerah	
	5.03.02.1.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	DOKUMEN	Rp	2.100.090.000	Rp -	1	Rp	2.100.090.000	0	Rp	765.113.666	0	Rp	501.565.444	Rp -	Rp -	0	Rp	1.266.679.110	0,00	60,32	Rp	12.666.791	0,00	0,01	Badan Kepegawaian Daerah	
	5.03.02.1.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	DOKUMEN	Rp	18.900.000	Rp -	1	Rp	18.900.000	0	Rp	2.951.000	0	Rp	-	Rp -	Rp -	0	Rp	2.951.000	0,00	15,61	Rp	29.510	0,00	0,00	Badan Kepegawaian Daerah	
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan(%)																		23,33	39,64			0,00	0,00						
Predikat Kinerja																		SR	SR			SR	SR						
	5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	LAPORAN	Rp	710.683.768	Rp -	2	Rp	710.683.768	0	Rp	82.015.000	1	Rp	165.770.200	Rp -	Rp -	1	Rp	247.785.200	50,00	34,87	Rp	2.477.852	0,00	0,00	Badan Kepegawaian Daerah	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	DOKUMEN				2			0		1						1		50,00				0,00		Badan Kepegawaian Daerah		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	DOKUMEN				2			0		1						1		50,00				0,00		Badan Kepegawaian Daerah		
	5.03.02.1.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	DOKUMEN	Rp	240.278.412	Rp -	2	Rp	240.278.412	0	Rp	26.334.000	1	Rp	16.061.000	Rp -	Rp -	1	Rp	42.395.000	50,00	17,64	Rp	423.950	0,00	0,00	Badan Kepegawaian Daerah	
	5.03.02.1.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	LAPORAN	Rp	241.654.356	Rp -	2	Rp	241.654.356	0	Rp	25.337.000	1	Rp	32.081.000	Rp -	Rp -	1	Rp	57.418.000	50,00	23,76	Rp	574.180	0,00	0,00	Badan Kepegawaian Daerah	
	5.03.02.1.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	DOKUMEN	Rp	228.751.000	Rp -	2	Rp	228.751.000	0	Rp	30.344.000	1	Rp	117.628.200	Rp -	Rp -	1	Rp	147.972.200	50,00	64,69	Rp	1.479.722	0,00	0,01	Badan Kepegawaian Daerah	
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan(%)																		50,00	35,36			0,00	0,00						
Predikat Kinerja																		SR	SR			SR	SR						
	5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	DOKUMEN	Rp	4.192.772.489	Rp -	12	Rp	4.192.772.489	3	Rp	486.942.100	3	Rp	311.002.300	Rp -	Rp -	6	Rp	797.944.400	50,00	19,03	Rp	7.979.444	0,00	0,00	Badan Kepegawaian Daerah	
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	LAPORAN				2			0		1						1		50,00				0,00		Badan Kepegawaian Daerah		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	DOKUMEN				4			0		2						2		50,00				0,00		Badan Kepegawaian Daerah		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	DOKUMEN				4			0		0						0		0,00				0,00		Badan Kepegawaian Daerah		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	DOKUMEN				12			3		3						6		50,00				0,00		Badan Kepegawaian Daerah		
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan	LAPORAN				2			0		0						0		0,00				0,00		Badan Kepegawaian Daerah		
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital																													



D39372A350

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/D39372A350>

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2025 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2025(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan							
										I		II		III		IV																		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6	7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17							
			Jabatan Fungsional																															
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Sertifikasi Jabatan ASN	ORANG			50		0		0					0		0,00			0,00				Badan Kepegawaian Daerah									
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Fungsional ASN	ORANG			50		0		0					0		0,00			0,00				Badan Kepegawaian Daerah									
			Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	DOKUMEN			4		0		2					2		50,00			0,00				Badan Kepegawaian Daerah									
			Jumlah Fungsional ASN yang Dibina	ORANG			2000		0		0					0		0,00			0,00				Badan Kepegawaian Daerah									
	5.03.02.1.03.0002	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	DOKUMEN	Rp	221.515.000		Rp	12	Rp	221.515.000	3	Rp	32.561.100	3	Rp	50.509.300		Rp	-	6	Rp	83.070.400	50,00	37,50		Rp	830.704	0,00	0,00	Badan Kepegawaian Daerah			
	5.03.02.1.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	DOKUMEN	Rp	3.248.675.740		Rp	-	4	Rp	3.248.675.740	0	Rp	450.000.000	2	Rp	226.596.000		Rp	-	2	Rp	676.596.000	50,00	20,83		Rp	6.765.960	0,00	0,00	Badan Kepegawaian Daerah		
	5.03.02.1.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	DOKUMEN	Rp	47.774.000		Rp	-	4	Rp	47.774.000	0	Rp	4.381.000	2	Rp	1.290.000		Rp	-	2	Rp	5.671.000	50,00	11,87		Rp	56.710	0,00	0,00	Badan Kepegawaian Daerah		
	5.03.02.1.03.0006	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Sertifikasi Jabatan ASN	ORANG	Rp	151.359.270		Rp	-	50	Rp	151.359.270	0	Rp	-	0	Rp	-		Rp	-	0	Rp	-	0,00	0,00		Rp	-	0,00	0,00	Badan Kepegawaian Daerah		
	5.03.02.1.03.0009	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	DOKUMEN	Rp	100.948.074		Rp	-	4	Rp	100.948.074	0	Rp	-	0	Rp	1.295.000		Rp	-	0	Rp	1.295.000	0,00	1,28		Rp	12.950	0,00	0,00	Badan Kepegawaian Daerah		
	5.03.02.1.03.0010	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Fungsional ASN	ORANG	Rp	183.407.400		Rp	-	50	Rp	183.407.400	0	Rp	-	0	Rp	-		Rp	-	0	Rp	-	0,00	0,00		Rp	-	0,00	0,00	Badan Kepegawaian Daerah		
	5.03.02.1.03.0012	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	LAPORAN	Rp	16.914.000		Rp	-	2	Rp	16.914.000	0	Rp	-	1	Rp	14.808.500		Rp	-	1	Rp	14.808.500	50,00	87,55			Rp	148.085	0,00	0,01	Badan Kepegawaian Daerah	
	5.03.02.1.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Fungsional ASN yang Dibina	ORANG	Rp	17.900.000		Rp	-	2000	Rp	17.900.000	0	Rp	-	0	Rp	-		Rp	-	0	Rp	-	0,00	0,00		Rp	-	0,00	0,00	Badan Kepegawaian Daerah		
	5.03.02.1.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	DOKUMEN	Rp	195.709.005		Rp	-	12	Rp	195.709.005	3	Rp	-	3	Rp	16.503.500		Rp	-	6	Rp	16.503.500	50,00	8,43			Rp	165.035	0,00	0,00	Badan Kepegawaian Daerah	
	5.03.02.1.03.0015	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	LAPORAN	Rp	8.570.000		Rp	-	2	Rp	8.570.000	0	Rp	-	0	Rp	-		Rp	-	0	Rp	-	0,00	0,00		Rp	-	0,00	0,00	Badan Kepegawaian Daerah		
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan(%)																		25,00	16,75			0,00	0,00											
Predikat Kinerja																		SR	SR			SR	SR											
5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	DOKUMEN	Rp	1.139.112.758		Rp	-	5	Rp	1.139.112.758	1	Rp	83.676.248	0	Rp	172.700.800		Rp	-	1	Rp	256.377.048	20,00	22,51		Rp	2.563.770	0,00	0,00	Badan Kepegawaian Daerah			
		Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	DOKUMEN				4		1		1									2			50,00				0,00			Badan Kepegawaian Daerah				
		Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	ORANG				12		0		0									0			0,00				0,00			Badan Kepegawaian Daerah				
		Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	ORANG				5000		0		0									0			0,00				0,00			Badan Kepegawaian Daerah				
		Jumlah ASN yang Mendapatkan	ORANG				50000		827		139									221			44,36				0,00			Badan Kepegawaian Daerah				
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital																																		



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/D39372A350>

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2025 (akhir periode Renstra PD Provinsi)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2025(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan		
												I	II	III	IV															
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.										K	Rp.
1	2	3	4	5		6	7	8		9		10		11		12		13		14		15		16		17				
			Pembinaan Kedisiplinan																											
	5.03.02.1.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	DOKUMEN	Rp	346.769.300	Rp -	5	Rp	346.769.300	1	Rp	10.810.000	0	Rp	69.667.000	Rp -	Rp -	1	Rp	80.477.000	20,00	23,21		Rp	804.770	0,00	0,00	Badan Kepegawaian Daerah	
	5.03.02.1.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	ORANG	Rp	631.276.265	Rp -	12	Rp	631.276.265	0	Rp	53.598.248	0	Rp	65.436.500	Rp -	Rp -	0	Rp	119.034.748	0,00	18,86		Rp	1.190.347	0,00	0,00	Badan Kepegawaian Daerah	
	5.03.02.1.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	ORANG	Rp	48.636.000	Rp -	5000	Rp	48.636.000	0	Rp	-	0	Rp	10.229.800	Rp -	Rp -	0	Rp	10.229.800	0,00	21,03		Rp	102.298	0,00	0,00	Badan Kepegawaian Daerah	
	5.03.02.1.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	ORANG	Rp	102.709.550	Rp -	50000	Rp	102.709.550	8271	Rp	19.268.000	13910	Rp	22.602.500	Rp -	Rp -	22181	Rp	41.870.500	44,36	40,77		Rp	418.705	0,00	0,00	Badan Kepegawaian Daerah	
	5.03.02.1.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	DOKUMEN	Rp	9.721.643	Rp -	4	Rp	9.721.643	1	Rp	-	1	Rp	4.765.000	Rp -	Rp -	2	Rp	4.765.000	50,00	49,01		Rp	47.650	0,00	0,00	Badan Kepegawaian Daerah	
																					Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan(%)		22,87	30,58			0,00	0,00		
																					Predikat Kinerja		SR	SR			SR	SR		
																					Rata-Rata Capaian Kinerja Program(%)		30,30	30,07			0,00	0,00		
																					Predikat Kinerja		SR	SR			SR	SR		
																					RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		34,66	35,74			0,00	0,00		
																					PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		SR	SR			SR	SR		



D39372A350

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/D39372A350>

2.2 Analisis Kinerja Layanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 140 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, memiliki tugas, pokok dan fungsi melaksanakan fungsi penunjang urusan kepegawaian yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, meliputi :

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
2. Penyelenggaraan perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
3. Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan serta pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis badan;
4. Penyelenggaraan administrasi Badan;
5. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Badan; dan
6. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Kinerja pelayanan Urusan Kepegawaian oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat pada periode sebelumnya ditetapkan dengan Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama dalam Perencanaan Strategis BKD Provinsi Jawa Barat periode Tahun 2024-2026 mengalami beberapa kali perubahan karena target kinerja indikator telah tercapai dan perlu reviu untuk menentukan kembali indikator kinerjanya. Capaian kinerja selama periode 2024-2025 tersaji dalam tabel berikut ini :

Tabel. 2.3
Pencapaian Kinerja Layanan
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi		Analisis Catatan
				2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Indeks Sistem Merit	-	-	400	402,5	402,5	400	n/a	402,5	402,5	-
2	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kualifikasi, Kinerja, Disiplin	-	-	53,96	53,98	54,01	53,93	n/a	53,98	54,01	-

Sumber: BKD Provinsi Jawa Barat 2025



D39372A350

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/D39372A350>

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKD

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat apabila di sandingkan dengan capaian yang telah di targetkan baik program, dan kegiatan, BKD Provinsi Jawa Barat telah mencapai target yang telah di tetapkan. Walaupun masih adanya kurang cermatan perencanaan saat menentukan kegiatan yang akan dilakukan baik secara waktu kegiatan maupun perhitungan saat mengakibatkan hal ini terjadi karena tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan pedoman penyusunan Renja.

Permasalahan dan hambatan yang di hadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi BKD, diuraikan sebagai berikut berikut :

Gambar 2.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Isu Strategis



D39372A350

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/D39372A350>

Tabel 2.4

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Program dan Kegiatan Prioritas

No.	Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah	
1	2	3	4	5	6
1.	Belum optimalnya profesionalisme dan integritas ASN serta belum sejahteranya ASN	1.	Sistem Merit belum dilaksanakan sepenuhnya	1.	Belum sepenuhnya aplikasi layanan kepegawaian yang terdigitalisasi dalam JSA.
				2.	Masih adanya kesulitan dalam otentifikasi dan parameter baru yang digunakan oleh API SIASN BKN agar komunikasi data kepegawaian dapat bersifat dua arah (<i>duplex</i>).
				3.	Belum adanya peraturan daerah yang mengatur masalah Manajemen ASN.
				4.	Masih rendahnya tingkat implementasi manajemen talenta di lingkungan Kabupaten/Kota se-Jawa Barat sebagai upaya dalam mendukung kebijakan manajemen talenta nasional.
				6.	Belum adanya instrumen yang efektif dalam pengelolaan kinerja PPPK.
				7.	Meningkatnya kasus pelanggaran disiplin yang terkait dengan pelanggaran moral
		2.	Peningkatan Indeks Profesionalisme belum sepenuhnya optimal	1.	Masih rendahnya tingkat kualifikasi ASN
				2.	Masih tingginya pelanggaran disiplin ASN
				3.	Masih terdapat ASN yang mendapatkan predikat nilai kinerja dibawah ekspektasi pimpinan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat dipertanggungjawabkan dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/D39372A350>



No.	Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah	
1	2	3	4	5	6
		3.	Adanya arahan pusat percepatan peningkatan efektifitas Reformasi Birokrasi nasional	1	Masih belum optimalnya nilai indeks <i>core value</i> ber AKHLAK di Provinsi Jawa Barat

Isu dan masalah strategis yang menjadi perhatian utama pada tahun 2026 merupakan hasil dari evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan tugas pokok fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat serta permasalahan yang timbul pada tahun-tahun sebelumnya.

Dengan memperhatikan evaluasi kinerja tahun 2024 dan hasil Forum Perangkat Daerah bidang kepegawaian tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, maka isu strategis Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Sistem Merit

Presiden Republik Indonesia menetapkan 5 prioritas kerja nasional Tahun 2020-2025 yang salah satunya yaitu “Pembangunan SDM” untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Salah satu upaya BKD Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan sumber daya manusia yaitu dengan memperkuat implementasi manajemen ASN berbasis sistem merit. Hal tersebut tertuang sebagai Indikator dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Pada Tahun 2024 Badan Kepegawaian Provinsi Jawa Barat selaku penanggungjawab Penerapan Sistem Merit di Provinsi Jawa Barat telah mengikuti penilaian Penerapan Sistem Merit yang dilaksanakan oleh KASN. Dalam penilaian tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendapatkan nilai sebesar 400 poin atau berada pada kategori IV dengan indikator berwarna biru, menunjukkan bahwa instansi dinilai “sangat baik”. Instansi dalam kategori tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar persyaratan sudah dipenuhi dan sudah dapat diizinkan untuk menjalankan seleksi terbatas di instansinya melalui talent pool dan dievaluasi setiap 2 tahun yang selanjutnya di serah terimakan tugas dan fungsi dari KASN ke BKN.



2. Indeks Profesionalitas ASN

Indeks Profesionalitas ASN bertujuan memberikan standar bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam melaksanakan penilaian profesionalitas ASN secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan. Pada Tahun 2024 dan 2025 Badan Kepegawaian Daerah dan BPSDM Provinsi Jawa Barat bersinergi dalam meningkatkan dan mempertahankan Nilai IP ASN Provinsi Jawa Barat dalam khususnya dalam dimensi Kompetensi.

3. Sistem Informasi Layanan Kepegawaian

Dalam mendukung pelaksanaan sistem merit di Provinsi Jawa Barat, diperlukan adanya digitalisasi sistem informasi layanan kepegawaian yang terus di tingkatkan sesuai dengan kebutuhan dan dinamika pemerintah pusat yang bertujuan agar pelayanan yang diberikan lebih cepat, efektif, efisien serta dapat menghemat anggaran yang akan dikeluarkan kemudian hari. Digitalisasi layanan kepegawaian juga membuat kinerja lebih terukur, target kinerja jelas, tunjangan adil, memudahkan pekerjaan karena tidak terikat tempat dan waktu, merubah budaya kerja dan data yang dihasilkan akan lebih komprehensif dan akuntabel.

4. Reformasi Birokrasi Tematik

Arahan Presiden tentang Reformasi Birokrasi bahwa birokrasi bukan tumpukan kertas, birokrasi harus lincah dan cepat agar berdampak dan langsung dirasakan masyarakat. Reformasi Birokrasi dalam manajemen SDM saat ini sedang beralih dari *performance based bureaucracy*, birokrasi berbasis aturan menjadi birokrasi berbasis *dynamic governance* yaitu pengembangan potensi *human capital*, ASN tak tersekat agar mampu menyesuaikan dengan perubahan yang cepat.

Dalam mendukung transformasi birokrasi yang dinamis, lincah dan profesional di lingkungan Instansi Pemerintah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menerbitkan Permenpan RB 11 Tahun 2024 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah. Kebijakan ini terkait dengan nomenklatur jabatan pelaksana menggantikan kebijakan lama yang dinilai sudah tidak relevan dan selaras dengan struktur yang baru.



Gambar 2.2
Faktor Internal dan Eksternal BKD di Lingkungan Prov Jabar



Namun demikian, BKD Provinsi Jawa Barat memiliki tantangan dan peluang dalam meningkatkan kinerja pelayanan, yang ditinjau dari faktor internal dan eksternal. Faktor Internal, meliputi :

Kekuatan :

1. ASN di lingkungan Provinsi Jawa Barat yang cukup memadai;
2. Tersedianya aplikasi layanan kepegawaian internal yang sudah terintegrasi seperti : KMOB, TRK, Siap Jabar sebagai tools dalam penilaian kinerja.

Kelemahan :

1. Anggaran tidak memadai untuk tugas belajar dan untuk Sistem Informasi;
2. Belum terintegrasinya secara menyeluruh antara aplikasi layanan kepegawaian BKD dengan Aplikasi Pusat. Salah satu contoh hanya aplikasi SIAP Jabar dan SIASN yang sudah terintegrasi selain itu belum terintegrasi.

Faktor Eksternal, yang meliputi :

Peluang :

1. Dukungan *stakeholder* atau seluruh unsur (baik akademisi, Lembaga swasta, Lembaga pemerintah, masyarakat atau komunitas serta media) dalam

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/D39372A350>



2. Inovasi dalam mendukung tuntutan kerja BKD Provinsi Jawa Barat.

Ancaman dan Tantangan :

1. Disrupsi, baik *digital disruption* dari revolusi industri 4.0 ke *society 5.0* *millennial disruption*, maupun *pandemic disruption* dimana penyesuaian kebiasaan baru pasca pandemic Covid-19;
2. Dinamika perekonomian dan politik global pasca perang; dan
3. Perubahan iklim.

2.4 Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2026

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Perubahan Atas keputusan Permendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenlatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah segera melakukan proses pemetaan (*mapping*) terhadap nomenklatur program dan kegiatan dalam RPJMD dengan program dan kegiatan dan sub kegiatan untuk kemudian dilakukan perubahan dengan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah, maka daripada itu BKD Provinsi Jawa Barat melakukan pemetaan terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang berada dalam Renstra BKD Provisi Jawa Barat 2025-2029 agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, serta berdasarkan telaahan yang telah dilakukan berikut lebih rinci hasil review terhadap RKPD Tahun 2026 Provinsi Jawa Barat proses telaahan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas BKD Provinsi Jawa Barat yang tercantum di dalam RKPD Tahun 2026.
2. Memastikan bahwa program/kegiatan di BKD Provinsi Jawa Barat merupakan kegiatan lanjutan/prioritas sudah termuat dalam RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026.
3. Membuat rumusan kebutuhan program dan kegiatan BKD hasil *review* terhadap RKPD yang lengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolak ukur dan besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap program/kegiatan.



Dokumen ini telah diotentikasi secara elektronik menggunakan Tanda Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/D39372A350>

Berdasarkan hasil telaahan yang BKD Tahun 2025 Perubahan Atas keputusan Permendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Hasil Verifikasi, validasi dan inventarisasi pemuktahiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, bahwa setiap perangkat daerah diminta melakukan proses pemetaan (*mapping*) terhadap nomenklatur program dan kegiatan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku termuat dalam Tabel 2.4 review RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/D39372A350>

Tabel 2.5
Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2026

No	Rancangan Akhir RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target 2026	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Badan Kepegawaian Daerah				87.961.015.118	Badan Kepegawaian Daerah				87.961.015.118	
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				87.961.015.118	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				87.961.015.118	
	KEPEGAWAIAN				87.961.015.118	KEPEGAWAIAN				87.961.015.118	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-		-	69.488.621.546	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-		-	69.488.621.546	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	839.427.178	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	839.427.178	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	14 Dokumen	326.248.620	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	14 Dokumen	326.248.620	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	4 Laporan	163.178.558	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	4 Laporan	163.178.558	
	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	1 Berita Acara	350.000.000	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	1 Berita Acara	350.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		-	50.208.863.186	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		-	50.208.863.186	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	138 Orang/ Bulan	49.946.861.371	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	138 Orang/ Bulan	49.946.861.371	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	15 Laporan	262.001.815	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	15 Laporan	262.001.815	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-		-	121.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-		-	121.000.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	25 Orang	121.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	25 Orang	121.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		-	2.545.121.881	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		-	2.545.121.881	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	20 Paket	443.544.255	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	20 Paket	443.544.255	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	12 Paket	284.670.650	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	12 Paket	284.670.650	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	12 Laporan	453.750.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	12 Laporan	453.750.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	12 Laporan	1.363.156.976	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	12 Laporan	1.363.156.976	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	-		-	3.678.787.845	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	-		-	3.678.787.845	
	Urusan Pemerintah Daerah					Urusan Pemerintah Daerah					
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	3 Unit	900.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	3 Unit	900.000.000	
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	12 Paket	350.000.000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	12 Paket	350.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	15 Unit	1.156.565.600	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	15 Unit	1.156.565.600	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	1 Unit	1.272.222.245	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	1 Unit	1.272.222.245	
	Pengadaan Jasa Penunjang Urusan	-		-	5.296.791.833	Pengadaan Jasa Penunjang Urusan	-		-	5.296.791.833	
	Badan Daerah										



D39372A350

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/D39372A350>

No	Rancangan Akhir RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target 2026	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	12 Laporan	556.633.196	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	12 Laporan	556.633.196	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	12 Laporan	113.498.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	12 Laporan	113.498.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	12 Laporan	4.626.660.637	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	12 Laporan	4.626.660.637	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	6.798.629.623	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	6.798.629.623	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	15 Unit	831.048.691	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	15 Unit	831.048.691	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	12 Unit	5.967.580.932	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	12 Unit	5.967.580.932	
2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	-		-	18.472.393.572	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	-		-	18.472.393.572	
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	-		-	8.201.957.504	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	-		-	8.201.957.504	
	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	1 Dokumen	245.300.000	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	1 Dokumen	245.300.000	
	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	1 Dokumen	154.000.000	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	1 Dokumen	154.000.000	
	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	-	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	-	2.854.190.500	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	-	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	-	2.854.190.500	
	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	1 Laporan	125.075.000	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	1 Laporan	125.075.000	
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	4 Dokumen	315.442.200	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	4 Dokumen	315.442.200	
	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	3 Lembaga	743.150.600	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	3 Lembaga	743.150.600	
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	12 Dokumen	3.643.380.600	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	12 Dokumen	3.643.380.600	
	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	1 Dokumen	121.418.604	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	1 Dokumen	121.418.604	
	Mutasi dan Promosi ASN	-		-	2.015.455.422	Mutasi dan Promosi ASN	-		-	2.015.455.422	
	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	1 Dokumen	641.381.422	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	1 Dokumen	641.381.422	
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	8 Laporan	641.381.000	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	8 Laporan	641.381.000	
	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	6 Dokumen	732.693.000	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	6 Dokumen	732.693.000	
	Pengembangan Kompetensi ASN	-		-	5.351.914.795	Pengembangan Kompetensi ASN	-		-	5.351.914.795	
	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	12 Dokumen	675.196.940	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	12 Dokumen	675.196.940	
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	4 Dokumen	1.968.555.299	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	4 Dokumen	1.968.555.299	
	Koordinasi dan Kerja Sama dengan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	4 Dokumen	298.741.498	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	4 Dokumen	298.741.498	



D39372A350

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/D39372A350>

No	Rancangan Akhir RPKD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target 2026	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Sertifikasi Jabatan ASN	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	100 Orang	195.195.990	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Sertifikasi Jabatan ASN	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	100 Orang	195.195.990	
	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	6 Dokumen	576.392.938	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	6 Dokumen	576.392.938	
	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	50 Orang	557.715.136	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	50 Orang	557.715.136	
	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	2 Laporan	164.348.053	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	2 Laporan	164.348.053	
	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Fungsional ASN yang Dibina	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	2000 Orang	165.883.505	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Fungsional ASN yang Dibina	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	2000 Orang	165.883.505	
	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	8 Dokumen	674.940.211	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	8 Dokumen	674.940.211	
	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	2 Laporan	74.945.225	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	2 Laporan	74.945.225	
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-		-	2.903.065.851	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-		-	2.903.065.851	
	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	8 Dokumen	917.492.180	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	8 Dokumen	917.492.180	
	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	15 Orang	1.454.396.198	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	15 Orang	1.454.396.198	
	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	500 Orang	122.189.292	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	500 Orang	122.189.292	
	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500 Orang	367.990.402	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500 Orang	367.990.402	
	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	-	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	-	40.997.779	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	-	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	-	40.997.779	
					87.961.015.118					87.961.015.118	



D39372A350

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/D39372A350>

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Forum Perangkat Daerah bidang kepegawaian Tahun 2025, BKD/BKPSDM Kabupaten/Kota, kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi tidak mengusulkan program dan kegiatan kepada Provinsi Jawa Barat untuk Tahun anggaran 2026.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/D39372A350>

D39372A350

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

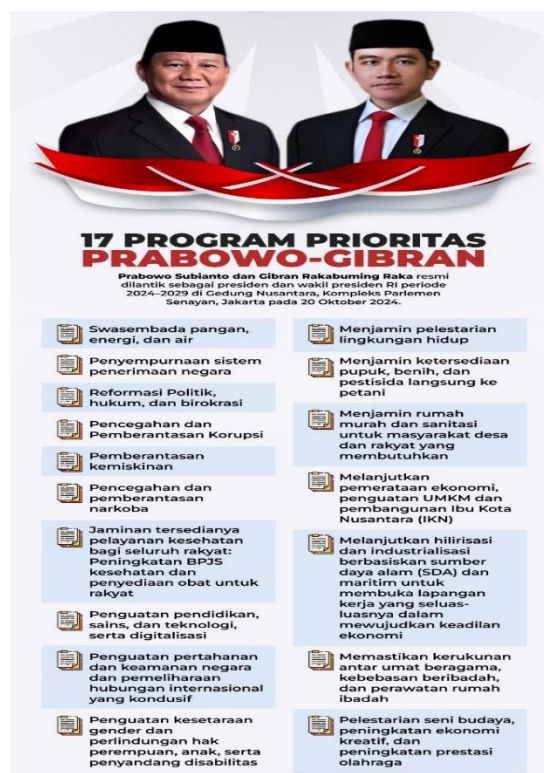
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2026

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap beberapa Renstra K/L yang berhubungan dengan Tugas dan Fungsi BKD Provinsi Jawa Barat dilakukan sebagai acuan dan sumber masukan penting bagi pengembangan dan penentuan isu strategis serta untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergi dengan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar

Program Prioritas Presiden dan Wakil Presiden



Keterkaitan **17 Program Prioritas Presiden** dengan **urusan bidang kepegawaian** sangat penting karena sumber daya manusia (SDM) aparatur negara merupakan motor penggerak utama dalam mewujudkan program-program tersebut. Urusan kepegawaian mencakup pengelolaan ASN (Aparatur Sipil Negara), mulai dari perencanaan, pengadaan, pengembangan kompetensi, hingga penilaian kinerja dan kesejahteraan. Keberhasilan pelaksanaan program prioritas presiden bergantung pada profesionalisme, integritas, dan kompetensi ASN yang menjalankannya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/D39372A350>

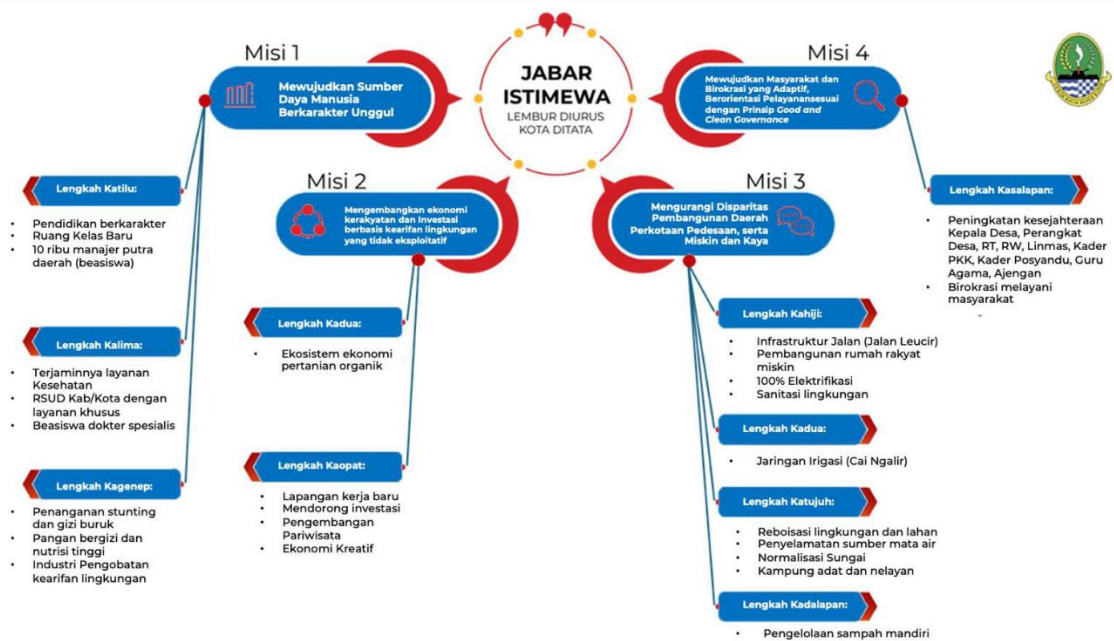


D39372A350

Telaahan Visi, Misi dan Program Kerja Kepala Daerah dan Wakil Daerah Terpilih Provinsi Jawa Barat

Visi Gubernur Jawa Barat seperti tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 adalah “**JABAR Istimewa Lembur Diurus, Kota Ditata**”.

Gambar 2.14
VISI, MISI, DAN 9 LANGKAH NGAWANGUN JAWA BARAT



Dalam rangka mengembangkan profesionalisme dan disiplin aparatur, selain upaya yang dilakukan berdasarkan kebijakan daerah, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat melaksanakan kebijakan nasional sebagaimana yang ditetapkan dalam tugas pokok Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat. Kebijakan nasional yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah adalah sebagai berikut:

- Pelaksanaan Amanat Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang utamanya adalah mengenai Proses pelimpahan kewenangan Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D) baik itu dari Kota ataupun Kabupaten kepada Provinsi;
- Pelaksanaan organisasi pasca penerapan Permendagri No. 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten atau Kota;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023

Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2023

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/D39372A350>



D39372A350

- 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- d. Pemberian penghargaan Satyalencana Karya Satya dari Presiden untuk masa kerja 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun;
 - e. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Struktural Kepemimpinan Tingkat I dan II dari Pusat;
 - f. Formasi pengadaan CPNSD baik dari Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kontrak (P3K) maupun pelamar umum tergantung formasi dari BKN Pusat;
 - g. Penerapan Undang-Undang No 20 Tahun 2023 tentang ASN dan kaitannya dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam pengelolaan administrasi kepegawaian.
 - h. Permenpan No 11 Tahun 2024 Tentang Nomenklatur Jabatan pelaksana ASN di Lingkungan Instansi pemerintah.

Rumusan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 tersebut telah memperhatikan program prioritas nasional yang tertuang di dalam RKPD Tahun 2026 serta didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029, hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2026 serta situasi dan kondisi eksternal (global).

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja BKD

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Tujuan, Sasaran dan Indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Tujuan jangka menengah Badan Kepegawaian Daerah yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah 2025-2059 yang telah disesuaikan dan dirubah pada Tahun 2025 menjadi:

Meningkatnya Pemerintahan yang Berintegritas, Adaptif dan Inovatif

Adapun sasaran strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat adalah :

Terwujudnya Birokrasi yang Gesit dan berorientasi pelayanan melalui Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Profesional , Berintegritas, Adaptif dan Inovatif



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/D39372A350>

Untuk lebih jelasnya tujuan, sasaran, dan indikator, serta capaian targetnya diuraikan dalam tabel berikut dibawah ini :

Tabel 3.1

Tujuan, Sasaran, Indikator Jangka Menengah

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran		Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Eksistinsi 2024	Target				
						2025	2026	2027	2028	2029
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya Pemerintahan yang berintegritas, Adaptif dan inovatif	S.1	Terwujudnya Birokrasi yang gesit dan berorientasi pelayanan melalui Aparatur Sipil negara (ASN) yang profesional, berintegritas dan Adaptif dan Inovatif.	Indeks Sistem Merit	Poin	400	400	402,5	402,5	405	405
	S.2	Terwujudnya Birokrasi yang gesit dan berorientasi pelayanan melalui Aparatur Sipil negara (ASN) yang profesional, berintegritas dan Adaptif dan Inovatif.	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi (1) Kualifikasi (2) Kinerja (3) Disiplin	Poin	53,93	53,96	53,98	54,01	54,03	54,05

3.3 Program dan Kegiatan

3.3.1 Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat melaksanakan kewenangannya dalam bidang kepegawaian yang meliputi pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian, mutasi dan promosi, pengembangan aparatur dan penghargaan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Perumusan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh BKD Provinsi Jawa Barat pada tahun 2025 dilakukan dengan melakukan pemetaan terhadap permasalahan dan hambatan berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja BKD Tahun 2024 dan capaian Renstra Tahun 2025-2029. Berikut dijelaskan lebih lanjut dalam tabel dibawah ini :

Dari pemetaan permasalahan yang telah diuraikan diatas, beberapa yang dijadikan prioritas oleh BKD adalah program-program yang mendukung langsung pada IKU Gubernur serta IKU Perangkat Daerah pada Tahun 2026 diantaranya :

1. Pengelolaan *Assessment Centre* dalam rangka pemetaan kompetensi dan potensi ASN;
2. Pemberian Beasiswa bagi PNS dengan Pendidikan S2 dan S3 serta Pemberian Beasiswa Bagi Dokter Spesialis PNS;
3. Pemuktahiran/Digitalisasi Sistem Informasi Layanan Kepegawaian.

Dokumen ini merupakan dokumen resmi yang telah diverifikasi dan disahkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/D39372A350>



D39372A350

Dimana dari prioritas diatas dimasukan kedalam program prioritas dengan pendanaan sebagai berikut :

Tabel 3.3 Matrik Program / Kegiatan Prioritas Tahun 2026

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pekerjaan Prioritas	Pagu Anggaran Pekerjaan Prioritas	Target Output
1	KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengembangan Kompetensi ASN	Pengelolaan Assessment Center	Pengelolaan Assessment Center dalam Pemetaan Kompetensi dan Potensi ASN	223.426.860,00	12 Dokumen
2			Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Pemberian Beasiswa S2/S3 bagi PNS Pemberian Beasiswa Dokter Spesialis bagi PNS	2.800.000.000,00	15 orang 6 Orang
3		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Pemutakhiran/Digitalisasi Sistem Informasi Layanan Kepegawaian	991.630.056,00	2 Dokumen

3.3.2 Program dan Kegiatan BKD Tahun 2026

Berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat serta mengacu kepada rancangan RKPD Provinsi Jawa Barat tahun 2026 serta hasil Forum Perangkat Daerah bidang kepegawaian tahun 2025, maka dirumuskan program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Program pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 adalah :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
- 2) Program Kepegawaian Daerah.

Program-program dan kegiatan-kegiatan disusun berdasarkan pendekatan kinerja dalam rangka pencapaian target kinerja yang tertuang dalam IKU Gubernur dan IKU Perangkat Daerah. Adapun lebih jelasnya keterkaitan kinerja antara program dan kegiatan tersebut dapat dilihat dalam lampiran Rencana Program Kerja, Indikator dan Target dalam Rencana Kerja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 dengan total kebutuhan dana sebesar Rp.87.961.015.118,- disajikan terlampir pada tabel berikut :



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/D39372A350>

3.4 Rumusan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2026

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Badan Kepegawaian Daerah						67.717.531.190,00							96.059.506.026,00	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						67.717.531.190,00							96.059.506.026,00	
	5	03				KEPEGAWAIAN						67.717.531.190,00							96.059.506.026,00	
1	5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	59.314.054.074,00						-	76.062.483.707,00	
	5	03	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	142.700.000,00			-	-	-	-	538.369.900,00	
	5	03	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				14 Dokumen	108.300.000,00	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		358.873.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	34.400.000,00	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		179.496.400,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	51.777.700.872,00			-	-	-	-	55.229.749.505,00	
	5	03	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				138 Orang/ Bulan	51.677.427.872,00	Kota Bandung, Bandung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI	-	-	-		54.941.547.508,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital																				



D39372A350

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siper dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/D39372A350>

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
													Wetan, Citarum	UMUM (DAU)						
	5	03	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				15 Laporan	100.273.000,00	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		288.201.997,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
	5	03	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	133.100.000,00	
	5	03	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				25 Orang	0,00	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		133.100.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
	5	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.275.641.320,00			-	-	-	-	2.799.634.070,00	
	5	03	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 Paket	310.169.820,00	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		487.898.681,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
	5	03	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	237.800.000,00	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		313.137.715,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
	5	03	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/D39372A350>

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	211.050.000,00	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		499.125.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH				
	5	03	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	516.621.500,00	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.499.472.674,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH				
	5	03	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	371.650.980,00			-	-	-	-	4.056.666.630,00					
	5	03	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	0,00	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		990.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH				
	5	03	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel																		
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				12 Paket	0,00	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		395.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH				
	5	03	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	0,00	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.272.222.160,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH				
	5	03	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		



D39372A350

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/D39372A350>

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	371.650.980,00	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.399.444.470,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	4.836.002.102,00			-	-	-	-	5.826.471.017,00	
	5	03	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	506.396.816,00	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		612.296.516,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	103.560.000,00	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		124.847.800,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	4.226.045.286,00	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.089.326.701,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	910.358.800,00			-	-	-	-	7.478.492.585,00	
	5	03	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	468.580.000,00	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		914.153.560,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/D39372A350>

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	03	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	441.778.800,00	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		6.564.339.025,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
2	5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-			-	8.403.477.116,00						-	19.997.022.319,00	
	5	03	02	1.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	-	-			-	2.836.807.526,00			-	-	-	-	8.699.542.114,00	
	5	03	02	1.01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				1 Dokumen	0,00	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		169.400.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	02	1.01	0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK														
							-				-	596.000.000,00	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.239.609.550,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	02	1.01	0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN														
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN				1 Laporan	0,00	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		136.670.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	02	1.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian														
							Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				4 Dokumen	145.594.000,00	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		346.986.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	02	1.01	0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN														



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/D39372A350>

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				3 Lembaga	414.087.000,00	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		817.465.600,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	02	1.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				12 Dokumen	1.681.126.526,00	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.855.850.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	02	1.01	0011	Pengelolaan Data Kepegawaian														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				1 Dokumen	0,00	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		133.560.464,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	02	1.02		Mutasi dan Promosi ASN	-	-			-	709.420.000,00			-	-	-	-	2.217.001.500,00	
	5	03	02	1.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN														
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah				1 Dokumen	221.000.000,00	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		705.519.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	02	1.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN														
							Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				8 Laporan	236.600.000,00	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		705.519.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	02	1.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				6 Dokumen	251.820.000,00	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		805.962.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	02	1.03		Pengembangan Kompetensi ASN	-	-			-	3.692.090.890,00			-	-	-	-	5.887.106.270,00	



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/D39372A350>

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	03	02	1.03	0002	Pengelolaan Assessment Center														
							Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center				12 Dokumen	223.426.860,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		742.716.634,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	02	1.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN														
							Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola				4 Dokumen	2.800.000.000,00	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.165.410.828,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	02	1.03	0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat														
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat				4 Dokumen	47.900.000,00	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		328.615.647,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	02	1.03	0006	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN														
							Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Sertifikasi Jabatan ASN				100 Orang	147.615.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		214.715.589,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	02	1.03	0009	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional														
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional				6 Dokumen	52.748.000,00	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		634.032.231,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		2	1.03	0010	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN															
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital																				



D39372A350

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/D39372A350>

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN				50 Orang	185.547.660,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		613.486.649,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	02	1.03	0012	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN														
							Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN				2 Laporan	0,00	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		180.782.858,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	02	1.03	0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN														
							Jumlah Fungsional ASN yang Dibina				2000 Orang	0,00	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		182.471.855,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	02	1.03	0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional														
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional				8 Dokumen	234.853.370,00	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		742.434.232,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	02	1.03	0015	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional														
							Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional				2 Laporan	0,00	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		82.439.747,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	02	1.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-	-			-	1.165.158.700,00			-	-	-	-	3.193.372.435,00	
	5	03	02	1.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur														
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				8 Dokumen	346.769.300,00	Kota Bandung, Bandung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.009.241.398,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital																				



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/D39372A350>

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
													Wetan, Citarum								
	5	03	02	1.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai															
							Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				9 Orang	631.276.200,00	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.599.835.817,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
	5	03	02	1.04	0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai															
							Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa				5000 Orang	58.363.200,00	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		134.408.221,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
	5	03	02	1.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN															
							Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				500 Orang	128.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		404.789.442,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
	5	03	02	1.04	0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai															
							0				4 0	0,00	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		45.097.557,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
	J U M L A H											67.717.531.190,00								96.059.506.026,00	



D39372A350

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/D39372A350>

3.3.3. Sinkronisasi Program dan Kegiatan Antar Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

Dari program dan kegiatan yang telah disebutkan sebelumnya, BKD Provinsi Jawa Barat sendiri tidak lepas kerjasamanya dengan perangkat daerah lain dalam mewujudkan target kinerjanya. Utamanya karena implementasi Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang berpengaruh terhadap susunan OPD, susunan pejabat struktural dan susunan tupoksi masing-masing perangkat daerah. Lebih lanjut lagi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat khususnya BKD Provinsi Jawa barat perlu mengkaji nomenklatur dan formasi akan jabatan fungsional tertentu yang sehubungan SOTK baru dalam lingkup Provinsi Jawa Barat dan Peraturan Menteri PAN-RB No. 11 tahun 2024 tentang Nomenklatur bagi Jabatan Pelaksana mendapatkan penyesuaian baik secara nomenklatur maupun formasi.

Perubahan dalam pengelolaan ASN yang semakin dinamis dijawab dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017 mengenai Manajemen ASN yang didalamnya terdapat perubahan-perubahan yang arahnya adalah menuju perubahan yang cepat dan tanggap dari para seluruh aparatur khususnya lingkup Provinsi Jawa Barat.

Selain itu beberapa catatan yang menjadi fokus perhatian dalam pelaksanaan kegiatan BKD pada tahun anggaran 2026 melibatkan beberapa perangkat daerah sebagai rekan kerjasama dalam upaya mewujudkan indikator sasaran yang sama dalam RPD 2024-2026, diantaranya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat, kaitannya dengan penyelenggaraan berbagai diklat teknis maupun fungsional serta diklat kepemimpinan. Selain itu, BKD juga tidak terlepas kerjasamanya dengan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam kaitannya dengan pelaksanaan analisis jabatan (ANJAB) dan analisis beban kerja (ABK), pemantapan tugas pokok dan fungsi organisasi, serta penetapan besaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP).

BKD juga merupakan *leader* untuk beberapa kegiatan penting yang melibatkan seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, diantaranya kegiatan pengukuran kinerja pegawai yang kemudian diaplikasikan dalam suatu sistem sasaran kerja pegawai yang telah terintegrasi secara *online*. Dalam hal ini setiap pegawai bertanggungjawab untuk menginput realisasi dari target sasaran kerja yang telah ditetapkan pada awal tahun berjalan. Tahap akhir dari proses penilaian kinerja tersebut ada di BKD selaku verifikator kinerja dari masing-masing pegawai di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Dalam pelaksanaannya, masing-masing perangkat daerah memiliki peranan



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/D39372A350>

Ditambah lagi dengan adanya beban tenaga pendidik dan kependidikan yang sejauh ini sudah mulai melaksanakan tugasnya sebagai pegawai lingkup Provinsi Jawa Barat yang artinya penilaian kinerja dan permasalahan kesejahteraan sudah sepenuhnya di tanggung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

BKD memiliki tanggungjawab besar dalam mewujudkan target yang telah ditetapkan pada tahun 2026. BKD dalam kegiatan Pengembangan Sumber Daya Aparatur memasukan program pendampingan serta sosialisasi guna memotivasi para ASN untuk tetap semangat dalam meraih beasiswa Jenjang s2 dan s3 serta Beasiswa bagi Dokter Spesialis..



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/D39372A350>

D39372A350

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKD TAHUN 2026

Rencana kerja dan pendanaan untuk program/kegiatan Tahun 2026 merupakan implementasi dari Renstra BKD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 yang secara simultan disinkronisasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 yang memuat 4 (empat) prioritas antara lain : 1) Mewujudkan sumber daya manusia berkarakter; 2) Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif; 3) Mengurangi disparitas pembangunan daerah perkotaan, pedesaan, serta miskin dan kaya; dan 4) Mewujudkan masyarakat dan birokrasi yang adaptif, berorientasi pelayanan, sesuai dengan prinsip good and clean governance.

BKD Provinsi Jawa Barat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran kinerja strategis perangkat daerah yang mendukung pencapaian prioritas pembangunan ke-4 yaitu mewujudkan masyarakat dan birokrasi yang adaptif, berorientasi pelayanan, sesuai dengan prinsip good and clean governance. Sebagaimana hasil perumusan arsitektur kinerja pembangunan daerah maka diperoleh rumusan yang terdiri dari 2 program dan 11 kegiatan serta 45 sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BKD Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2026 dengan lokasi kegiatan sebagian besar berada di Jawa Barat, seperti disajikan pada tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan BKD Provinsi Jawa Barat di bawah ini :



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/D39372A350>

Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan BKD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2					3	4	5	6	7	8	9
						Badan Kepegawaian Daerah						
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
	5	3				KEPEGAWAIAN						
1	5	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-	59.314.054.074,00			
	5	3	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	142.700.000,00			
	5	3	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14 Dokumen	108.300.000,00	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5	3	1	1.01	7							
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	34.400.000,00	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5	3	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	51.777.700.872,00			
	5	3	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	138 Orang/ Bulan	51.677.427.872,00	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	
				1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD					



D39372A350

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/D39372A350>

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2					3	4	5	6	7	8	9
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15 Laporan	100.273.000,00	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5	3	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	0			
	5	3	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	0	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5	3	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.275.641.320,00			
	5	3	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	310.169.820,00	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5	3	1	1.06	5							
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	237.800.000,00	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5	3	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu						
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	211.050.000,00	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5	3	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						



D39372A350

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2					3	4	5	6	7	8	9
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	516.621.500,00	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5	3	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	371.650.980,00			
	5	3	1	1.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	0	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5	3	1	1.07	5	Pengadaan Mebel						
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Paket	0	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5	3	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	0	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5	3	1	1.07	#	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	371.650.980,00	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5	3	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.836.002.102,00			
	5	3	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						



D39372A350

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/D39372A350>

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2					3	4	5	6	7	8	9
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	506.396.816,00	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5	3	1	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	103.560.000,00	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5	3	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4.226.045.286,00	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5	3	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	910.358.800,00			
	5	3	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	468.580.000,00	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5	3	1	1.09	#	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	441.778.800,00	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	5	3	2			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-	8.403.477.116,00			
	5	3	2	1.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	-	-	2.836.807.526,00			
	2	1.01	2	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN								



D39372A350

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/D39372A350>

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2					3	4	5	6	7	8	9
							Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	0	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5	3	2	1.01	3	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK						
							-	-	596.000.000,00	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5	3	2	1.01	4	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN						
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1 Laporan	0	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5	3	2	1.01	6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian						
							Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	4 Dokumen	145.594.000,00	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5	3	2	1.01	8	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN						
							Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	3 Lembaga	414.087.000,00	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5	3	2	1.01	#	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian						
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	1.681.126.526,00	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5	3	2	1.01	#	Pengelolaan Data Kepegawaian						
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	0	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5	3	2	1.02		Mutasi dan Promosi ASN	-	-	709.420.000,00			
	5	3	2	1.02	1	Pengelolaan Mutasi ASN						



D39372A350

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/D39372A350>

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2					3	4	5	6	7	8	9
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	1 Dokumen	221.000.000,00	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5	3	2	1.02	2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN						
							Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	8 Laporan	236.600.000,00	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5	3	2	1.02	3	Pengelolaan Promosi ASN						
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	6 Dokumen	251.820.000,00	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5	3	2	1.03		Pengembangan Kompetensi ASN	-	-	3.692.090.890,00			
	5	3	2	1.03	2	Pengelolaan Assessment Center						
							Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	12 Dokumen	223.426.860,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5	3	2	1.03	4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN						
							Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	4 Dokumen	2.800.000.000,00	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5	3	2	1.03	5	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat						
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	4 Dokumen	47.900.000,00	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5	3	2	1.03	6							



D39372A350

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/D39372A350>

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2					3	4	5	6	7	8	9
							Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Sertifikasi Jabatan ASN	100 Orang	147.615.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5	3	2	1.03	9	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional						
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	6 Dokumen	52.748.000,00	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5	3	2	1.03	#	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN						
							Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	50 Orang	185.547.660,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5	3	2	1.03	#	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN						
							Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	2 Laporan	0	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5	3	2	1.03	#	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN						
							Jumlah Fungsional ASN yang Dibina	2000 Orang	0	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5	3	2	1.03	#	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional						
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	8 Dokumen	234.853.370,00	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5	3	2	1.03	#	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional						



D39372A350

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/D39372A350>

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2					3	4	5	6	7	8	9
							Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	2 Laporan	0	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5	3	2	1.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-	-	1.165.158.700,00			
	5	3	2	1.04	2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	8 Dokumen	346.769.300,00	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5	3	2	1.04	4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai						
							Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	9 Orang	631.276.200,00	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5	3	2	1.04	5	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai						
							Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	5000 Orang	58.363.200,00	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5	3	2	1.04	7	Pembinaan Disiplin ASN						
							Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	500 Orang	128.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	5	3	2	1.04	9	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai						
							0	4 0	0	Kota Bandung, Bandung Wetan, Citarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	J U M L A H								67.717.531.190,00			



BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat untuk periode 1 (satu) tahun kedepan yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Strategis BKD Provinsi Jawa Barat 2025-2029 dan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026.

Memahami evaluasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, BKD Provinsi Jawa Barat berusaha menetapkan Rencana Kerja Tahun 2026 agar program dan kegiatannya selalu dapat mendukung peningkatan pelayanan BKD Provinsi Jawa Barat terhadap publik maupun PNS di lingkungan Provinsi Jawa Barat. Selain itu mengacu pada permasalahan dan isu-isu strategis yang ada, BKD Provinsi Jawa Barat menciptakan ide kreatif dan inovasi melalui kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme aparat pemerintah daerah dan mengubah paradigma sumber daya aparatur agar lebih berorientasi kepada pemberian pelayanan prima serta peningkatan kinerja.

Rencana Kerja hendaknya tidak dipandang sebagai pemenuhan kewajiban normatif semata, tetapi hal yang terpenting dan menjadi inti permasalahan adalah perubahan paradigma berpikir dan bertindak sesuai dengan tujuan yang akan dicapai pada tahun 2026. Karena itu Rencana Kerja BKD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 akan dapat terlaksana apabila terdapat komitmen dari seluruh jajaran aparatur lingkungan BKD Provinsi Jawa Barat mulai dari pimpinan sampai dengan pelaksana dalam melaksanakan kesepakatan yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja BKD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026.

